

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama yang menjadi penggerak perekonomian di Sulawesi Selatan. Perairan Sulawesi Selatan yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) 713 merupakan perairan yang kaya sumberdaya perikanan dengan wilayah yang mencakup perairan Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan, dengan garis pantai sepanjang 1.937 km memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir melalui penyediaan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan protein ikan bagi masyarakat.

Data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulawesi Selatan. Selama periode 2019-2022, kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2019, nilai kontribusi sektor perikanan sebesar 8,4% dari total PDRB Sulawesi Selatan dengan nilai mencapai 42,5 Trilyun yang meningkat menjadi 9,42% dari total PDRB Sulawesi Selatan dengan nilai mencapai 56,4 Trilyun hingga akhir tahun 2022.

Sebagaimana kita ketahui, periode tahun 2020 - 2022 adalah masa dimana pandemi *covid-19* melanda dunia namun data PDRB diatas menunjukkan bahwa pandemi *covid-19* ternyata tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas sektor perikanan di Sulawesi Selatan. Hanya tahun 2023 kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan mengalami perlambatan dengan kontribusi masih mencapai 8,4% dari total PDRB dengan nilai PDRB sektor perikanan mencapai 56,2 Trilyun.



Nilai kontribusi PDRB tersebut menunjukkan peran penting sektor perikanan dalam struktur ekonomi Sulawesi Selatan (DKP Sulsel, 2023).

Produksi total perikanan yang dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan menjadi salah satu indikator makroekonomi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Selatan. Data produksi total perikanan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan produksi rata-rata sebesar 3,7% pada kurun waktu 2018-2022. Data total ekspor Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 untuk komoditas perikanan juga mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari meningkatnya realisasi ekspor produk perikanan dari Sulawesi Selatan. Volume ekspor produk perikanan tahun 2018 meningkat dari 130.623,1 Ton menjadi 200.926,6 Ton pada tahun 2023 dan nilai ekspor produk perikanan juga mengalami peningkatan dari 340,3 juta USD pada 2018 menjadi 416,76 juta USD pada tahun 2023.

Melihat barisan angka statistik diatas, secara umum sektor perikanan menunjukkan kinerja positif pada perekonomian Sulawesi Selatan. Namun kontribusi sektor perikanan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara persentase belum berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi PDRB dan nilai ekspor produk perikanan Sulawesi Selatan. Secara statistik perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengalami peningkatan produksi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai kontribusi PDRB sektor perikanan di Sulawesi Selatan. Apabila nilai PDRB sektor perikanan cukup tinggi maka potensi untuk mengembangkan sumber-sumber PAD dari sektor perikanan juga tinggi. Optimalisasi strategi dan kebijakan untuk menjembatani kesenjangan antara potensi ekonomi (PDRB) dan pendapatan yang diperoleh (PAD)



Kunci dalam meningkatkan kontribusi sektor perikanan. Perlu dikembangkan yang lebih tepat dan komprehensif untuk pengambilan kebijakan yang mengoptimalkan pendapatan daerah sektor perikanan.

Data capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan (DKPSS) periode 2020–2023 menunjukkan bahwa penerimaan tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan nilai pendapatan sebesar Rp.3.013.005.180. Tahun 2023, PAD mengalami penurunan sebesar 6,11% menjadi Rp 2.828.654.450,-. Jika dibandingkan dengan nilai APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun anggaran 2023, yang berjumlah Rp.100.020.581.653,- maka diperoleh nilai *share* kontribusi PAD sektor perikanan terhadap APBD DKPSS hanya menyumbang sekitar 2,83%. Nilai *share* itu masuk dalam kategori rendah jika kita mengacu pada indeks kemampuan keuangan Bappenas. Sebab itu perlu diambil langkah-langkah strategis sebagai upaya peningkatan PAD Sektor Perikanan Sulawesi Selatan.

Peningkatan PAD secara optimal dapat memberikan efek pada peningkatan kapasitas pembiayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan. Dengan pendapatan yang memadai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan akan leluasa mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur bagi unit-unit kerja pengumpul PAD seperti Pelabuhan Perikanan, Balai Benih Ikan Udang dan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Secara keseluruhan, optimalisasi PAD sektor perikanan adalah fondasi penting untuk mencapai pengelolaan yang lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan.

Studi ini bertujuan menganalisis langkah-langkah komprehensif dalam meningkatkan PAD Sulawesi Selatan dari sektor kelautan dan perikanan dengan fokus kajian pengelolaan Pelabuhan Perikanan Beba (PP Beba) Kabupaten Takalar.



Studi ini menganalisis aspek pendukung dan penghambat dalam proses pengumpulan PAD serta menyusun strategi yang relevan sesuai tupoksi unit kerja. Dengan memahami potensi, tantangan, dan peluang yang ada, diharapkan dapat

dirumuskan langkah strategis yang tepat sebagai rekomendasi strategi yang implementatif untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Potensi Sulawesi Selatan pada sektor perikanan yang tampak dalam angka statistik seharusnya bisa memberikan kontribusi positif pada Pendapatan Asli Daerah. Berbagai persoalan seperti keterbatasan infrastruktur, regulasi, perubahan iklim, akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan, hambatan penerapan inovasi dan teknologi serta koordinasi dengan sektor industri penunjang menjadi tantangan tersendiri. Tantangan ini menimbulkan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dan fokus kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana situasi aktual pengelolaan PAD sektor perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pengelolaan PAD di Pelabuhan Perikanan Beba Takalar?
2. Dalam upaya peningkatan PAD sektor perikanan dari pengelolaan Pelabuhan Perikanan Beba, apa tantangan utama yang dihadapi dan aspek apa yang mempengaruhi peningkatan PAD sektor perikanan Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana strategi efektif untuk meningkatkan kontribusi PAD sektor perikanan Sulawesi Selatan dari pengelolaan Pelabuhan Perikanan Beba?
4. Apa rekomendasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pelabuhan Perikanan Beba-Takalar?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Pendeskripsian dan analisis situasi aktual pengelolaan PAD sektor perikanan Sulawesi Selatan dengan melihat kondisi pengelolaan PAD di Pelabuhan Perikanan Beba – Takalar.
2. Mengidentifikasi tantangan utama (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam pengelolaan PP Beba dalam mengumpulkan PAD Sektor Perikanan Sulawesi Selatan.
3. Merumuskan strategi yang efektif untuk optimalisasi kontribusi PAD sektor perikanan Sulawesi Selatan dari pengelolaan PP Beba.
4. Memberikan rekomendasi strategi yang aplikatif dalam untuk meningkatkan kontribusi PAD sektor perikanan Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperkaya literatur dan berkontribusi terhadap pengembangan teori desentralisasi dan pengelolaan sumberdaya daerah khususnya mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor perikanan.
2. Menjadi acuan akademik untuk penelitian strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan.
3. Memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk meningkatkan kontribusi penerimaan retribusi sektor perikanan dan menyediakan panduan untuk mengatasi tantangan internal serta memanfaatkan segala peluang eksternal yang muncul dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Beba.



emberikan wawasan pentingnya kontribusi pelaku usaha perikanan rhadap PAD daerah melalui kepatuhan terhadap retribusi daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan pembagian kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya lokal (Oates, 1972). Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dibandingkan pemerintah pusat. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur pengeluaran sesuai prioritas lokal, perpajakan, retribusi, dan transfer fiskal.

Prinsip utama desentralisasi fiskal adalah efisiensi alokasi, pemerataan fiskal, dan akuntabilitas (Bird, 2020). Pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi dapat menyediakan layanan publik yang lebih relevan. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah menerima dukungan dari pemerintah pusat untuk tetap menjalankan fungsi pemerintahan melalui transfer fiskal, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Desentralisasi fiskal sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan secara mandiri oleh daerah, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah untuk menjadi penopang utama kemandirian fiskal di daerah.

Laporan perekonomian Bank Indonesia menyebutkan kemandirian fiskal esi Selatan 2023 tercatat meningkat dibandingkan 2022. Hal ini tercermin asio Pendapatan Asli Daerah seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi



Sulawesi Selatan, termasuk Pemerintah Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota, terhadap total pendapatan, yang meningkat dari 22% menjadi 24,53%. Peningkatan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, yang mencerminkan kemandirian fiskal yang lebih baik, dapat dicapai melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya ini perlu didukung oleh kolaborasi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2024).

Ada beberapa tantangan dalam penerapan desentralisasi fiskal pada sektor kelautan dan perikanan yaitu infrastruktur, pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, penerapan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, dan pengelolaan sumberdaya manusia. Ketidakmerataan infrastruktur di daerah pesisir seperti fasilitas pelabuhan perikanan yang tidak memadai, kurangnya fasilitas rantai dingin seperti *cold storage* dan pabrik es, serta fasilitas pengolahan hasil perikanan yang terbatas perlu mendapat perhatian khusus.

Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan seperti praktik *IUU Fishing (illegal, unregulated, unreproted fishing)* yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut harus diberantas dengan pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas. Penerapan ekonomi biru menjadi salah satu lokus yang mutlak dilaksanakan untuk menghadapi tantangan tersebut dan menunjang pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan (Pauli, 2020). Pemanfaatan teknologi digital yang cukup rendah dalam pengelolaan PAD perlu ditingkatkan untuk efisiensi dan transparansi. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam kapasitas

sumberdaya manusia, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keamanan kebijakan fiskal. Tantangan ini bisa diatasi dengan pendekatan



desentralisasi fiskal yang baik untuk mengurangi ketimpangan dalam penerapan kebijakan dan pengelolaan fiskal daerah.

Transfer fiskal yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah pengoptimalan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil ke sektor kelautan perikanan. DAK dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan, TPI, *break water* dan fasilitas pengolahan hasil perikanan. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan DAK ini untuk meningkatkan kapasitas sektor perikanan di daerah pesisir yang memerlukan dukungan pendanaan untuk proyek infrastruktur. Dengan adanya DAK, daerah dapat memperbaiki kualitas infrastruktur perikanan tanpa bergantung sepenuhnya pada PAD. Dana Bagi Hasil (DBH) retribusi perikanan dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendanai program-program pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pemanfaatan DBH dengan bijak dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pengembangan sektor ini.

Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, desentralisasi fiskal memungkinkan daerah seperti Sulawesi Selatan dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut dan pesisir untuk peningkatan PAD. Dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penarikan retribusi diatur melalui beberapa regulasi daerah, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan yang terbaru adalah Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu mandiri dalam melaksanakan pembangunan. PAD menjadi indikator utama keberhasilan desentralisasi fiskal karena menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya lokal tanpa bergantung sepenuhnya pemerintah pusat melalui dana transfer. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber penerimaan utama yang berperan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjelaskan bahwa PAD merupakan penerimaan yang didapat oleh daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU HKPD diketahui bahwa PAD bersumber dari empat komponen utama yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (UU HKPD,2022).

Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pengelolaan PAD harus memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam teori desentralisasi fiskal, PAD memiliki peran strategis sebagai pilar utama sebagai pendukung berjalannya pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin tinggi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan. Dengan demikian, PAD berfungsi sebagai alat yang mendukung pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah menyediakan fasilitas pendanaan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan



pembangunan yang selaras dengan potensi dan karakteristik lokal. Sumber-sumber PAD yang beragam memungkinkan pemerintah daerah untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam konteks Sulawesi Selatan, sektor kelautan dan perikanan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menopang peningkatan PAD karena memiliki potensi yang besar.

Pajak daerah, sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah, mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, serta pajak kendaraan bermotor. Pajak dikumpulkan dari aktivitas ekonomi lokal yang secara langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan memiliki nilai strategis dalam keberlangsungan pembangunan daerah. Tingkat pengelolaan yang baik menjadikan pajak daerah sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah.

Retribusi daerah merupakan komponen kedua sebagai sumber PAD sebagaimana dijelaskan dalam UU HKPD. Retribusi ini bersifat spesifik dan merupakan penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan bagi pemerintah daerah atas pelayanan atau penggunaan fasilitas yang disediakan. Retribusi ini mencakup retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan pelabuhan termasuk pelabuhan perikanan. Dengan pengelolaan yang efisien, retribusi daerah dapat berkontribusi langsung pada peningkatan PAD.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi komponen ketiga sumber PAD seperti pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diperoleh dari pengelolaan aset yang dikelola pemerintah daerah.

Di konteks daerah pesisir seperti Sulawesi Selatan, kekayaan sumberdaya alam, fasilitas perbenihan dan fasilitas pelabuhan dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mendukung kontribusi PAD.



Pendapatan lain-lain yang sah menjadi komponen ke-empat sebagai sumber PAD, termasuk pendapatan dari bunga deposito, hasil penjualan aset daerah, dan hibah. Sumber ini seringkali tidak menjadi perhatian utama, tetapi dengan pengelolaan yang inovatif, pendapatan dari komponen ini dapat menjadi tambahan yang signifikan bagi PAD.

Optimalisasi PAD seringkali menghadapi tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi, kurangnya infrastruktur pendukung, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi keuangan. Selain itu, pengelolaan PAD yang masih manual di banyak daerah meningkatkan risiko kebocoran pendapatan. Salah satu langkah untuk mengatasi tantangan ini adalah digitalisasi pengelolaan PAD. Penerapan teknologi digital, seperti sistem pembayaran elektronik dan aplikasi berbasis web, memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau penerimaan secara real-time. Selain itu, teknologi meningkatkan efisiensi pencatatan dan transparansi sehingga meminimalkan resiko kebocoran pendapatan. Kelemahaan dalam pengelolaan PAD juga mencakup kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaku usaha. Disektor kelautan dan perikanan misalnya, aktivitas ilegal seperti illegal fishing dan destruvtive fishing menyebabkan kehilangan potensi pendapatan dari retribusi. Dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum, pemerintah daerah dapat meningkatkan kontribusi PAD dari sektor ini.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelola keuangan daerah menjadi salah satu strategi peningkatan PAD. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 menyebutkan bahwa SDM yang memiliki kompetensi akan prasyarat dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif. lolaan PAD yang profesional dan efektif diwujudkan dengan memberikan llikan dan pelatihan kepada staf pengelola administrasi pajak dan retribusi .



Dengan SDM yang kompeten, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Optimalisasi PAD membutuhkan dukungan regulasi yang memadai karena berkaitan dengan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya daerah. Regulasi memberikan dasar hukum yang jelas dan pasti bagi pemerintah daerah dalam mengelola, memungut, dan mengawasi PAD. Tanpa regulasi yang memadai, pengelolaan PAD rentan terhadap pelanggaran hukum, konflik kepentingan, atau gugatan hukum dari masyarakat dan pelaku usaha. Regulasi mengatur prosedur yang transparan dalam pengelolaan PAD, termasuk pelaporan dan penggunaan dana. Hal ini penting untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

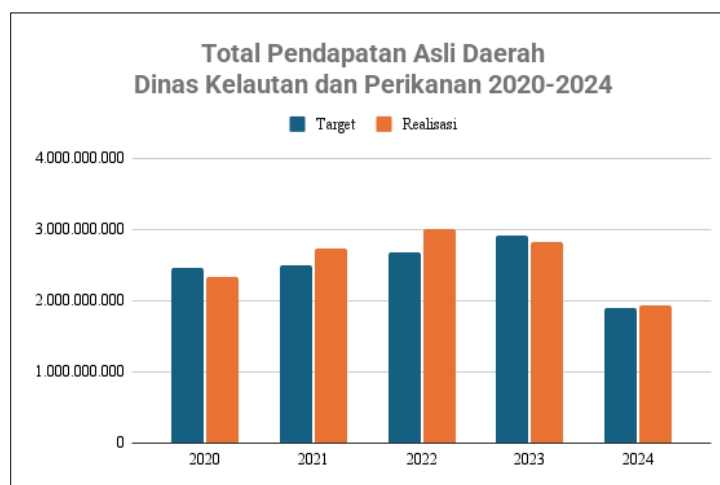
Dalam konteks pembangunan daerah, PAD memiliki peran yang sangat strategis. Dana yang diperoleh dari PAD digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi seperti rumah sakit, pelabuhan, pasar dan jalan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan PAD untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi serta sektor kelautan dan perikanan. PAD adalah elemen kunci dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah. Dengan pengelolaan yang efektif, PAD dapat menjadi sumber utama untuk mendanai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kintek sulawesi selatan, optimalisasi PAD dari sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas strategis yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.



C. Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 19 kabupaten/kota yang memiliki potensi besar di sektor perikanan dan kelautan, terutama pada perikanan laut, sementara 5 kabupaten/kota lainnya memiliki potensi di perikanan air tawar atau perairan umum (Renstra 2024-2026). Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan, seperti usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan industri pengolahan, menawarkan peluang besar untuk terus dikembangkan. Berdasarkan data statistik tahun 2022, sektor kelautan dan perikanan menyumbang sekitar 9,42% bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan. Angka ini menunjukkan peran penting sektor kelautan dan perikanan dalam struktur ekonomi Sulawesi Selatan (BPS 2023).

Jika memperhatikan hal diatas maka kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap PDRB, tetapi kontribusinya terhadap PAD Sulawesi Selatan masih relatif kecil. Jika kita bandingkan antara postur anggaran tahun 2023 (Rp.100.020.581.653) dengan realisasi PAD tahun 2023 (Rp.2.828.654.450) maka kontribusinya hanya angka 2,83%.



Gambar 1. 1 Total PAD Dinas Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024



Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat realisasi PAD tertinggi pada angka Rp.3.013.005.180,-. Menurut Halim (2021) dalam tabel kriteria kontribusi bahwa jika nilai berada pada kisaran 0 – 10% maka sektor tersebut termasuk dalam kriteria “kurang”. Dinas Kelautan dan Perikanan harus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan nilai PAD untuk berkontribusi dalam meningkatkan nilai kemandirian daerah.

Sumber PAD yang potensial dari sektor perikanan di Sulawesi Selatan adalah retribusi jasa pelabuhan perikanan, retribusi hasil penjualan benih pada balai benih udang dan ikan, dan retribusi jasa pelayanan laboraorium (hasil uji mutu hasil perikanan). Pasca terbitnya UU 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah maka terjadi beberapa pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, begitupun sebaliknya. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan, yang sebelumnya berada di bawah kabupaten/kota, kini dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini menjadi tantangan untuk mengoptimalkan pelabuhan perikanan sebagai sumber pendapatan potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu meningkatkan produksi perikanan dengan cara menambah volume produksi serta meningkatkan produktivitasnya. Indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis tersebut yaitu peningkatan kontribusi PDRB perikanan dan produksi hasil perikanan. Produk Domestik

Bruto (PDRB) sektor perikanan merujuk pada total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan di suatu daerah atau kabupaten/kota.



Tabel 2. 1 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel 2018-2023

Kontribusi PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sektor Perikanan	8,39	8,42	8,5	9,43	9,44	8,61

Data realisasi kontribusi PDRB sub sektor perikanan tahun 2023 menunjukkan bahwa target tercapai sebesar 153,78% namun jika dibandingkan tahun 2022 mengalami perlambatan senilai 8,79%. Kurun waktu 2018-2023 kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan naik dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,88 %. Perlambatan pertumbuhan PDRB perikanan dipengaruhi penurunan nilai produksi perikanan sebesar 6,21 % yaitu nilai produksi budidaya sebesar 15,65 %. Penyebab turunnya nilai produksi budidaya adalah turunnya nilai produksi rumput laut sebesar 27,80 %. Hal ini disebabkan karena harga rumput laut dipengaruhi oleh harga pasar dan permintaan negara tujuan ekspor.

Tabel 2. 2 Realisasi Ekspor Perikanan Sulawesi Selatan 2018-2023

Uraian	Realisasi Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor Perikanan (ton)	190.623	166.373	158.416	179.019	191.325	200.926
Rumput Laut	105.760	140.420	134.818	152.276	165.000	180.027
Udang	4.462	7.098	8.107	9.093	8.392	6.591
Tuna Cakalang Tongkol	2.455	2.915	2.474	1.880	3.305	2.567
Ikan lainnya	17.946	15.939	12.578	15.769	14.626	11.740
Nilai Ekspor US \$ (1000)	340.369	355.301	339.002	397.787	528.397	416.746
Rumput Laut	116.105	160.277	137.661	164.656	314.307	232.294
Udang	42.871	63.968	75.827	82.272	75.301	54.282
Tuna Cakalang Tongkol	20.329	27.081	23.292	17.766	32.814	25.160
Ikan lainnya	161.064	103.973	101.491	96.345	105.974	105.008

Sumber : Laporan Tahunan Kelautan dan Perikanan 2023

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PDRB adalah meningkatkan produktivitas (volume dan nilai) perikanan. Nilai produksi perikanan budidaya dapat kita lihat pada tabel dibawah. Tabel diatas menjelaskan bahwa nilai produksi

nya mencapai target 114,76 % namun turun sebesar 15,65 % dibandingkan 2022. Kurun waktu 2018 - 2023 nilai produksi budidaya terus meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 9,32 %.



Tabel 2. 3 Capai Nilai Kinerja Produksi Budidaya Sulawesi Selatan 2018-2023

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Produksi Budidaya (Rp)	13.735,0	14.856,3	13.785,5	15.878,2	21.712,6	18.313,8

Sumber : Laporan Tahunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2023

Tahun 2020 mengalami penurunan akibat imbas pandemi *covid*, kemudian tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Jika dilihat dari nilai produksi komoditi budidaya yang mengalami penurunan adalah nilai produksi rumput laut turun sebesar 27,80 % dan nilai produksi bandeng sebesar 7,35 %. Nilai produksi bandeng turun seiring dengan penurunan volume produksi sedangkan nilai produksi rumput laut berbanding terbalik dengan volume produksi. Hal ini disebabkan penurunan harga yaitu tahun 2022 harga rata rata rumput laut *E Cottonii* Basah sebesar Rp4.992 dan rumput laut kering Rp29.953 sedangkan tahun 2023 harga rata-rata rumput laut *E Cottonii* basah Rp3.484 dan Kering Rp20.900. Nilai produksi rumput laut berkontribusi sekitar 50 % terhadap total nilai produksi budidaya sehingga mempengaruhi fluktuasi nilai produksi budidaya. Sebagai salah satu komoditi ekspor, harga rumput laut sangat dipengaruhi harga permintaan pasar negara tujuan ekspor. Perlu menjadi perhatian adalah memastikan kualitas rumput laut agar mampu bersaing dengan negara produsen rumput laut lainnya. Upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan kepada pembudidaya terkait perlunya memperhatikan kualitas rumput laut mulai dari proses *onfarm* yaitu menggunakan bibit berkualitas, penanganan pasca panen rumput laut (pengeringan sampai dengan pengemasan).

Nilai produksi perikanan tangkap tahun 2023 mencapai target dengan in sebesar 149,79 % dan naik sebesar 16,79% jika dibandingkan tahun



Tabel 2. 4 Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Sulawesi Selatan 2018-2023

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Tahun 2023 (Akhir RPJMD)	
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi	Target
Nilai Hilirsasi Produksi Perikanan Tangkap	7.987,2	8.631,3	8.678,9	10.679,9	11.812,5	13.795,77	9.210,12

Sumber : Laporan Tahunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2023

Kurun waktu 2018 - 2023 nilai produksi tangkap terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 14,77%. Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap seiring dengan volume produksi yang terus meningkat. Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap didapatkan dari komoditi unggulan perikanan tangkap yaitu Tuna Cakalang Tongkol yang nilai produksinya naik dengan peningkatan 2,90% dan gurita naik 209% dibandingkan tahun 2022.

Indikator kedua keberhasilan capaian strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan adalah peningkatan produksi hasil perikanan. Peningkatan ini didukung oleh kontribusi dari produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan produksi garam. Produksi perikanan budidaya mencakup hasil budidaya dari seluruh kabupaten/kota, termasuk perikanan air tawar, payau, dan laut (termasuk rumput laut). Sementara itu, produksi garam berasal dari seluruh wilayah kabupaten/kota penghasil garam. Adapun peningkatan produksi perikanan tangkap diperoleh dari perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum daratan.

Tabel 2. 5 Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Garam Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan budidaya	3.568.952	3.662.761	4.081.480	4.095.934	4.115.586	4.115.586
Perikanan tangkap	366.540	398.565	389.208	417.410	436.735	504.709
Garam	86.712	140.338	45.310	1.283	3.387	114.959
	4.022.206	4.201.665	4.147.630	4.500.174	4.536.058	4.735.254

Sumber : Laporan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2023



Tabel diatas menjelaskan bahwa target capaian tingkat produksi perikanan sebesar 99,48% yang mengalami kenaikan sebesar 4,39% dibandingkan tahun 2022. Produksi perikanan tumbuh positif selama kurun waktu 2018 – 2023 dengan peningkatan rata-rata 4,22%. Tidak tercapainya target disebabkan perlambatan peningkatan produksi budidaya yaitu sebesar 0,48% jauh dari proyeksi perencanaan yaitu tumbuh sebesar 5%. Faktor penyebabnya akibat musim musim kemarau sehingga produksi budidaya air tawar tidak optimal akibat kurangnya pasokan air dan mempengaruhi kualitas air. Selain itu harga rumput laut yang turun mempengaruhi animo pembudidaya. Upaya yang telah dilakukan adalah penerapan teknologi budidaya yaitu teknologi *bioflock*. Perlu diterapkan teknologi yang adaptif, aplikatif, efektif, dan efisien. Penerapan teknologi budidaya menjadikan penggunaan pakan lebih efisien, produktifitas tinggi, hemat air dan ramah lingkungan.

Data produksi budidaya perikanan tercatat sebesar 95,75% dari target dan mengalami kenaikan 0,48% dibandingkan tahun 2022. Perkembangan produksi budidaya tahun 2018-2023 terus meningkat dengan rata-rata 3,69%. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 4.243.467 ton telah mencapai 97,28%. Tingkat produksi perikanan budidaya berasal dari produksi budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar.



Tabel 2. 6 Perkembangan Komoditi Unggulan Budidaya Tahun 2018 - 2023

Komoditi	Realisasi Tahun						% Peningkatan/ Penurunan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Rumput laut basah (ton)	3.217.542,9	3.406.942,6	3.441.138,7	3.786.411,7	3.796.733,3	3.844.803,3	+1,27
Udang (ton)	46.542,0	44.520,5	50.876,1	54.974,6	61.446,2	67.295,13	+9,52
Udang windu (ton)	10.169,5	10.370,2	10.595,4	11.457,5	10.662,4	8.876,56	-16,75
Bandeng (ton)	179.254	184.186,2	193.589,2	211.225,4	206.091,4	173.239,1	-15,94

Sumber : Laporan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2023

Perlambatan peningkatan produksi budidaya disebabkan peningkatan produksi rumput laut sebesar 1,27 % dan penurunan komoditi budidaya tambak yaitu udang windu turun 0,38 % dan bandeng turun 2,89 %. Salah satu penyebab akibat musim kemarau sehingga produksi budidaya air tawar tidak optimal akibat kurangnya pasokan air, hal ini mempengaruhi kualitas air sehingga menyebabkan pertumbuhan terhambat bahkan menyebabkan gagal panen, selain itu harga rumput laut yang turun mempengaruhi animo pembudidaya. Produksi rumput laut berkontribusi paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya yaitu berkisar 93 %. Pencapaian volume produksi perikanan budidaya didukung kegiatan bantuan bibit, sarana prasarana budidaya, serta pembinaan dan pendampingan teknis secara rutin untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Produksi perikanan tangkap mencapai 119,16 % dari target dan naik 12,69 % dibandingkan capaian tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata Produksi 7,74 % kurun waktu 2018-2023. Produksi perikanan tangkap yang dihasilkan dari produksi rumput laut sebesar 448.272 ton dan produksi perairan umum sebesar 43.887,5 ton. Komoditi unggulan perikanan tangkap yaitu Tuna Cakalang Tongkol naik 1,81 %,



produksi gurita naik 209 %. Produksi perikanan tangkap dapat didorong dengan memberikan bantuan kepada nelayan berupa alat tangkap, alat bantu tangkap, mesin, rumpon, dan kapal serta pengembangan sarana prasarana perlabuhan perikanan sebagai sentra produksi perikanan.

Produksi garam mencapai target sebesar 230,39 % dan naik 3.194,86 % dibandingkan tahun 2022. Kurun waktu 2018-2023 produksi garam rakyat sangat fluktuatif dimana produksi tertinggi di tahun 2019 sebesar 140.338,87 ton dan terendah di tahun 2021 yaitu 1.502,36 ton. Hal ini disebabkan karena produksi garam rakyat sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Tahun 2023 peningkatan produksi garam didukung faktor cuaca yaitu musim kemarau yang cukup panjang di tahun 2023 dimulai bulan maret dan puncak produksi dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi produksi garam yaitu geomembran untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam. Sebagai upaya mendukung peningkatan produksi garam di kabupaten maka dilakukan pembinaan KUGAR dalam mendukung stok garam nasional. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah disusun Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Rencana Induk Pergaraman Daerah Tahun 2020-2024. Rencana tersebut didukung melalui penganggaran dari APBN, termasuk penyusunan DED SEGAR (Sentra Ekonomi Garam).

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mencakup tiga unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab dalam pengumpulan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: UPT Pelabuhan Perikanan



I dan II), UPT PBAPL, Instalasi Budidaya Air Tawar Lajoa, dan UPT Balai Mutu Produk Perikanan. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I memiliki tugas untuk mengelola pelabuhan perikanan di wilayah Maros, Pangkep,

Barru, Pare-pare, Pinrang, Bone, Wajo, Luwu, Palopo, hingga Luwu Timur. Sementara itu, UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan perikanan di wilayah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, hingga Selayar.

Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi perikanan tangkap. Dalam operasional pelabuhan perikanan berlaku retribusi tambat labuh kapal perikanan, retribusi parkir, retribusi sewa lahan, sewa kios, retribusi jasa Tempat Pelelangan Ikan dan Kerjasama Cold Storage. Total semua pelabuhan perikanan yang beroperasi di Sulawesi Selatan adalah 19 pelabuhan perikanan, jika semua pelabuhan ini berkontribusi maksimal dalam pengumpulan PAD maka pelabuhan perikanan dapat menjadi tumpuan dalam pengumpulan PAD Sulawesi Selatan.

Dalam menjalankan fungsi operasional pelabuhan perikanan ada target yang harus direalisasikan. Tahun 2023 realisasi standar operasional pelabuhan perikanan memenuhi standar operasional sebesar 89,47% meningkat dibandingkan tahun 2022 terealisasi 68,42 %. Persentase pelabuhan perikanan sesuai standar operasional jika memenuhi minimal 3 standar operasional yaitu telah operasional, penetapan kelas oleh kementerian, memiliki kelembagaan, memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran, menyusun wkopp dan menerapkan CPIB. Dari total 19 pelabuhan perikanan, sebanyak 17 pelabuhan telah memenuhi standar operasional. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan terus mengupayakan secara maksimal agar seluruh pelabuhan perikanan dapat memenuhi standar operasional dengan optimal.



Tabel 2. 7 Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Standar Operasional

No	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Memenuhi Standar Operasional Sesuai IKK LPPD Permendagri 28 Tahun 2020			
		Telah Operasional	Penetapan Kelas oleh MKP	Memiliki Kelembagaan	Petugas Syahbandar
UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I					
1	Lonrae, Bone	√	X	√	√
2	Cempae, Pare-Pare	√	X	√	√
3	Maccini Baji, Pangkep	√	X	√	√
4	Bontobahari, Maros	√	X	√	√
5	Polejiwa, Barru	X	X	√	X
6	Sumpang Binangae, Barru	√	X	√	√
7	Pontap, Palopo	√	X	√	√
8	Lero, Pinrang	√	X	√	√
9	Ulo-Ulo, Luwu	√	X	√	√
10	Balambang, Luwu	√	X	√	√
UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II					
1	Paotere, Makassar	√	X	√	√
2	Beba, Takalar	√	X	√	√
3	Lappa, Sinjai	√	X	√	√
4	Kajang, Bulukumba	√	X	√	√
5	Bontobahari, Bulukumba	√	X	√	√
6	Birea, Bantaeng	√	√	√	√
7	Bonehalang, Selayar	√	√	√	√
8	Tanrusampe, Jeneponto	√	X	√	X
9	Barombong Gowa	√	X	√	√

Sumber : Laporan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2023

Faktor pendorong keberhasilan operasional pelabuhan perikanan adalah alokasi anggaran penyediaan sarana prasarana pelabuhan untuk mendukung operasional pelabuhan dan penetapan struktur pelayanan (Kasatpel dan Syahbandar) untuk optimalisasi pelayanan di pelabuhan. Dua pelabuhan tidak memenuhi standar operasional yaitu Pelabuhan Perikanan Polejiwa Kab. Barru dan Pelabuhan Perikanan Tanrusampe Kab. Jeneponto karena kondisi PP Polejiwa sejak dibangun oleh kabupaten tidak operasional karena dibangun di lokasi yang bukan aktifitas nelayan dan PP Tanrusampe Kab. Jeneponto dimana armada yang si adalah kapal dibawah 5 GT yang tidak membutuhkan dokumen indaran sehingga tidak ada penempatan syahbandar/petugas syahbandar. dua pelabuhan tersebut perlu dibuat pertimbangan teknis terkait



pengembangan pelabuhan kedepan. Pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah sebagai unit kerja pengumpul PAD.

UPT PBAPL dan Instalasi Pembenihan Air Tawar Soppeng mendukung peningkatan produksi benih udang dan benih ikan air tawar. Produksi yang dihasilkan dikonversi sebagai pendapatan asli daerah. Pendapatan tersebut diperoleh dari retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah yaitu penjualan benih ikan dan udang. Target yang ingin dicapai adalah Persentase Ketersediaan Benur Berkualitas. Tahun 2023 persentase ketersediaan benur berkualitas terealisasi 112,58 %. Capaian ini lebih baik dibandingkan tahun 2022 yaitu 78,51 %. Tahun 2023 target benur berkualitas sebesar 10.000.000 ekor terealisasi 11.258.000 ekor terdiri dari target bantuan 900.000 ekor (realisasi 900.000 ekor) dan penjualan PAD 9.100.000 (realisasi 10.358.000 ekor). Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan ketersediaan benur berkualitas adalah dukungan operasional (pengadaan induk berkualitas, pakan dan obat-obatan), jaminan bebas virus melalui hasil uji *PCR* agar dapat menjamin keberhasilan budidaya dan meningkatkan minat pembeli untuk menggunakan benur dari UPT PBAPL.

Tabel 2. 8 Ketersediaan Benur oleh UPT PBAPL tahun 2021 – 2023

Uraian	Realisasi (ekor)		
	2021	2022	2023
Penjualan (PAD)	20.834.500	9.682.000	10.358.000
Bantuan	7.280.000	7.590.000	900.000
Total	28.114.500	17.272.000	11.258.000

Sumber : Laporan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2023

UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut, sebagai perpanjangan tangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan upaya dan kegiatan dalam mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulawesi khususnya di bidang pengembangan budidaya perikanan, dengan fokus



pada budidaya air payau dan laut. Ketersediaan benur berkualitas adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan UPT PBAPL dalam rangka pembinaan berupa bantuan benur dan sebagai sumber penerimaan PAD.

UPT BPMPP merupakan salah satu unit kerja yang berkontribusi dalam pengumpulan PAD Sektor Perikanan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas dan fungsi yang diemban meliputi pelaksanaan layanan teknis operasional untuk pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, pengembangan atau diversifikasi produk hasil perikanan, serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk perikanan. Retribusi yang dijalankan oleh UPT BPMPP adalah retribusi pemakaian alat uji laboratorium. Data menunjukkan bahwa persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan mencapai target sebesar 97,40 % yang mengalami kenaikan 27.07 % dibandingkan tahun 2022. Realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2023 disebabkan adanya perlambatan kinerja di tahun 2021 karena dampak kondisi pandemi *covid-19*.

D. Analisis Tematik

Analisis tematik merupakan salah satu metode analisis data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena fleksibilitasnya, kemudahan penerapannya, serta kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang kaya dan rinci tentang suatu kumpulan data (Braun & Clarke, 2006). Metode ini membantu kita mengenali, menata, dan menceritakan pola tema-tema yang berulang dalam data. Tema-tema tersebut merangkum maksud yang ingin disampaikan partisipan sekaligus tetap berpaut erat pada pertanyaan penelitian.

Analisis tematik tidak mengikat peneliti pada satu aliran teori atau posisi logis tertentu; ia dapat digunakan melalui beragam kerangka teoritis seperti fenomenologi, hingga konstruksionisme. Fleksibilitas inilah yang membuatnya populer digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan



sikap individu secara mendalam. Pada intinya, analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) yang terdapat dalam data. Tema-tema ini menjadi inti dari makna yang ingin disampaikan oleh partisipan dan berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian. Braun dan Clarke (2006) mengusulkan sebuah kerangka kerja analisis tematik yang terstruktur dan sistematis, yang terdiri dari enam fase. Langkah-langkah ini tidak selalu linier tetapi bersifat iteratif, dimana peneliti mungkin perlu bolak-balik antara fase-fase untuk memperdalam pemahaman terhadap data. Untuk transparansi, setiap keputusan dicatat dalam *audit trail* (log analitik) beserta memo reflektif peneliti. Kerangka kerja analisis tematik adalah sebagai berikut:

1. Familiarisasi dengan Data (*Familiarising Yourself with Your Data*)

Langkah pertama adalah melakukan transkripsi verbatim terhadap seluruh hasil wawancara. Ini melibatkan pembacaan dan pembacaan ulang transkrip wawancara, catatan lapangan, atau dokumen lainnya secara aktif dan berulang-ulang. Peneliti tidak hanya membaca untuk memahami konten, tetapi juga mulai mencatat ide-ide awal, kesan yang muncul dan potensi pola. Menurut Creswell (2014), proses ini adalah fondasi untuk analisis yang teliti, karena memungkinkan peneliti untuk memahami kedalaman dan nuansa data. Di Indonesia, Novianti et al. (2020) dalam penelitiannya tentang pengalaman belajar daring selama pandemi juga menekankan pentingnya fase ini untuk menangkap konteks kultural dan makna tersirat dari pernyataan partisipan. Familiarisasi yang memadai membantu membangun kepekaan terhadap variasi makna, baik pada level semantik (tersurat) maupun laten (tersembunyi).



2. Menghasilkan Kode Awal (*Generating Initial Codes*)

Koding adalah proses mengorganisir data ke dalam kelompok makna yang bermakna. Sebuah 'kode' adalah kata atau frasa pendek yang secara simbolis

mengaitkan esensi atau fitur penting dari data. Peneliti secara sistematis menelusuri seluruh rangkaian data, mengekstrak potongan-potongan data yang penting dan memberinya label kode. Kode dapat bersifat semantik (terkait langsung dengan isi) atau laten (mencari makna di balik isi). Proses ini memerlukan ketekunan dan perhatian terhadap detail. Seperti yang dilakukan oleh Kertati et al. (2023) dalam menganalisis persepsi guru terhadap kurikulum merdeka, peneliti membuat ratusan kode awal sebelum kemudian menyaringnya menjadi tema. Pengodean dilakukan baris-demi-baris pada potongan data yang relevan dengan pertanyaan riset. Kode tidak dipaksakan untuk “rapi sejak awal”; ia dibiarkan banyak dan granular agar kelak dapat digabung, dipecah, atau dipertajam.

3. Pencarian Tema (*Searching for Themes*)

Pada fase ini, peneliti mulai mengelompokkan kode-kode yang berbeda ke dalam calon tema yang potensial. Sebuah ‘tema’ menangkap sesuatu yang penting tentang data dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian dan mewakili suatu tingkat pola atau makna yang tertanam dalam kumpulan data. Peneliti memeriksa semua kode yang telah dihasilkan dan mengumpulkan kode-kode yang saling terkait untuk membentuk tema yang lebih luas. Kode-kode kemudian dikelompokkan menjadi calon tema dengan menggunakan teknik pengelompokan (*clustering*). Teknik seperti membuat peta pikiran (*mind mapping*) atau tabel dapat sangat membantu dalam memvisualisasikan hubungan antara kode dan calon tema. Braun dan Clarke (2019) menegaskan bahwa fase ini adalah tentang mulai menggambar “peta” dari data yang dianalisis. Sebuah tema dipahami bukan sekadar topik berulang, tetapi konsep pengorganisasi yang menjelaskan bagaimana kode-kode saling berelasi

b fokus penelitian.



4. Peninjauan Kembali Tema (*Reviewing Themes*)

Fase ini terdiri dari dua tingkat peninjauan. Pertama, peneliti meninjau calon tema terhadap kumpulan kode untuk memastikan bahwa mereka membentuk pola yang koheren. Kedua, peneliti meninjau tema-tema tersebut terhadap keseluruhan kumpulan data untuk memeriksa apakah mereka secara akurat merepresentasikan data secara keseluruhan. Pada tahap ini, beberapa tema mungkin digabungkan, dipisah, dibuang, atau tema baru mungkin diciptakan. Tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan peta tema sehingga memiliki narasi yang jelas dan logis. Menurut Nowell et al. (2017), peninjauan tema oleh rekan sejawat atau supervisor sangat dianjurkan untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Tahap ini memeriksa apakah data pendukung di dalam tema konsisten) dan apakah antar-tema cukup berbeda. Data yang belum “pas” dikembalikan ke bank kode, sementara tema yang terlalu luas dipecah dan yang terlalu sempit digabung.

5. Pendefinisian dan Pemberian Nama Tema (*Defining and Naming Themes*)

Setiap tema mendefinisikan tema dengan jelas dan menentukan ‘cerita’ apa yang diceritakan. Peneliti menuliskan analisis mendetail untuk setiap tema, menjelaskan cakupannya, dan bagaimana tema tersebut berkontribusi menjawab pertanyaan penelitian. Pemberian nama tema juga harus dilakukan dengan cermat agar nama tersebut dapat mencerminkan inti dari tema tersebut secara akurat dan menarik. Setiap tema diberi definisi naratif yang jelas, ruang lingkupnya dibatasi, serta dinamai secara jelas-ekspresif agar maknanya langsung terbaca. Pada fase ini, sub-tema dapat dipertahankan bila membantu mengorganisasi narasi.

6. Produksi Laporan (*Producing the Report*)



agian ini bukan hanya sekadar menyajikan tema-tema, tetapi juga akan kisah yang meyakinkan dari data. Peneliti harus menyajikan bukti-bukti (kutipan) untuk setiap tema, dan menganalisisnya dalam kaitannya dengan

literatur dan pertanyaan penelitian. Kutipan harus dipilih yang paling jernih dan kuat mewakili tema. Menurut Creswell (2014), narasi harus jelas, logis, dan memberikan wawasan yang bermakna. Seperti ditunjukkan oleh penelitian Sari & Hidayat (2022) tentang resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, penyajian kutipan langsung dari partisipan penting untuk memberikan suara autentik kepada mereka yang diteliti dan memperkuat argumen peneliti. Laporan menyajikan keterjalinan tema-tema utama dengan pertanyaan riset dan literatur, lengkap dengan kutipan serta peta tema. Kualitas laporan dinilai bukan pada banyaknya tema, melainkan ketajaman argumentasi dan keterlacakan proses dari data mentah ke simpulan.

Kesimpulan dalam analisis tematik merupakan hasil sintesis dari seluruh proses analisis. Setelah tema-tema diidentifikasi dan dilaporkan, peneliti perlu merefleksikan dan menginterpretasikan makna yang lebih luas dari kumpulan tema tersebut. Proses menarik kesimpulan ini memerlukan pemikiran kritis dan reflektif untuk bergerak melampaui deskripsi data menuju interpretasi yang bermakna dan signifikan secara akademis (Braun & Clarke, 2006; Kertati et al., 2023).

E. Analisis SWOT

Salah satu pendekatan analisis data yang melibatkan identifikasi faktor internal dan eksternal secara terstruktur untuk menyusun strategi adalah analisis SWOT. Metode ini bertumpu pada prinsip mengenali dan mengoptimalkan kekuatan (*strength*) serta peluang (*opportunity*), sembari mengurangi kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) yang mempengaruhi kinerja organisasi/perusahaan (Rangkuti, 2018).

Pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan tujuan, strategi, dan kebijakan. Dalam prosesnya, perencana strategis perlu luasi faktor-faktor strategis yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan dalam konteks situasi saat ini yang disebut analisis situasi (Rangkuti, 2018).



Setelah menganalisis hubungan antar komponen SWOT, langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi gabungan antara komponen SWOT yaitu Strategi S-O, Strategi W-O, Strategi S-T, Strategi W-T, yang kemudian disusun dalam bentuk matriks SWOT. (Tabel 2.9). Berdasarkan penjelasan Rangkuti (2018), strategi yang dihasilkan mencerminkan kondisi yang sedang berlangsung. Ada empat kemungkinan strategi yang dapat dihasilkan dari proses ini.

- Strategi SO memanfaatkan seluruh kekuatan (S) untuk merebut dan memanfaatkan peluang (O) sebesar-besarnya;
- Strategi ST memanfaatkan kekuatan (S) yang dimiliki untuk mengatasi ancaman (T) yang ada;
- Strategi WO memanfaatkan peluang (O) untuk meminimalisir kelemahan (W) yang ada;
- Strategi WT meminimalkan kelemahan (W) yang ada serta menghindari ancaman yang ada (T).

Tabel 2. 9 Matriks SWOT

	IFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	EFAS	Menentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal	Menentukan 5-10 faktor-faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O)		STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
Menentukan 5-10 faktor faktor peluang eksternal		Menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Menghasilkan strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang
THREATS (T)		STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
Menentukan 5-10 faktor faktor peluang eksternal		Menghasilkan strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Menghasilkan strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman



igan:
internal factors analysis summary,
external factors analysis summary,
 : Rangkuti, 2018

Sumber ini menjelaskan bahwa semakin besar total nilai skor (hasil dari bobot dikalikan rating) yang diperoleh dalam analisis, maka kebijakan yang diambil akan semakin sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki potensi yang kuat untuk secara komprehensif memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Sebaliknya, jika total nilai yang diperoleh lebih kecil, maka kebijakan yang diterapkan kemungkinan besar tidak akan memberikan hasil yang memuaskan atau kurang optimal bagi target pelaksanaan kebijakan tersebut (Rangkuti, 2018).



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada kajian literatur yang relevan dengan isu strategi pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di sektor perikanan. Hasil analisis dari penelitian sebelumnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 10 Penelitian Terdahulu

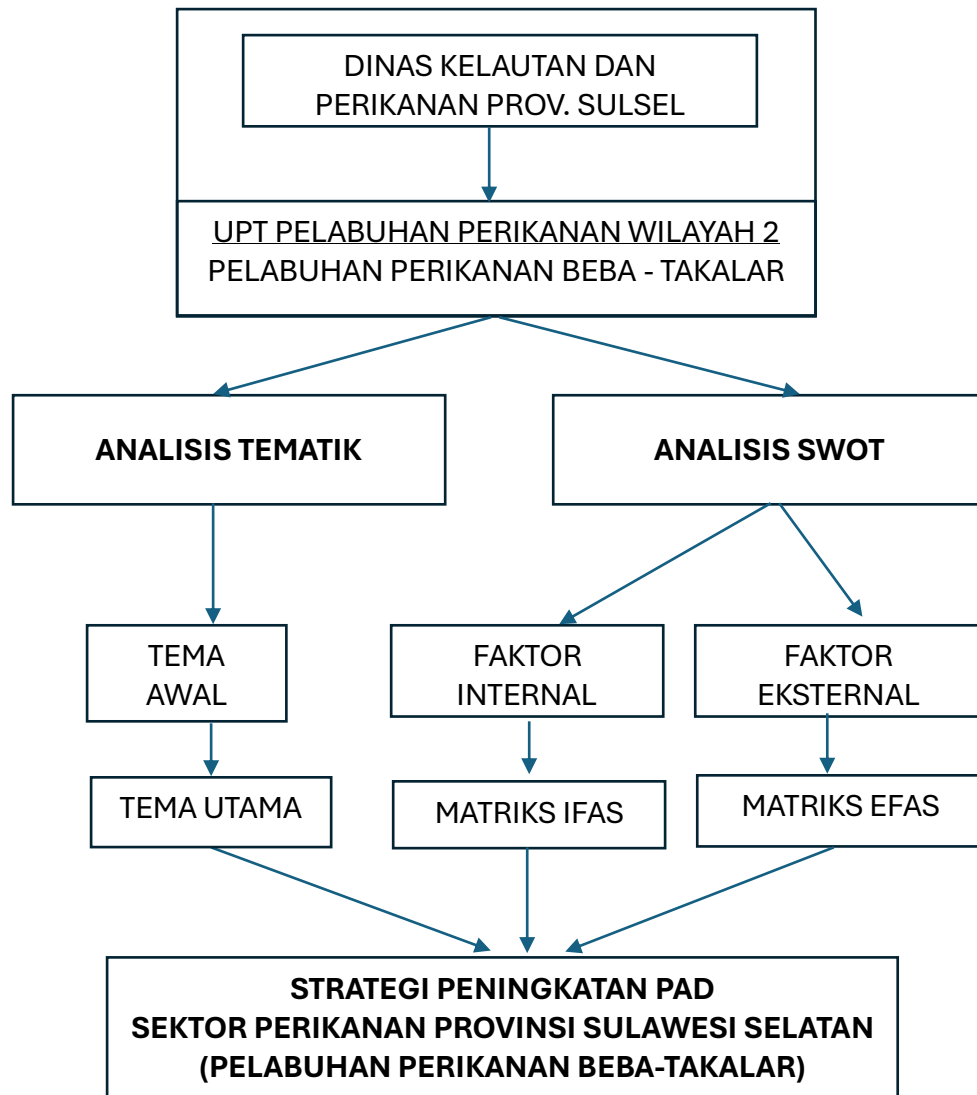
No.	Nama Peneliti/Judul Penelitian/Hasil Penelitian
1.	Sri Suro Adhawati dan St. Marlian Mansyur (2023) , dengan judul penelitian “Potensi dan Proyeksi Nilai PDRB Sektor Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi PDRB sektor perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2023-2027 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis menggunakan metode LQ dan DLQ, rata-rata nilai yang diperoleh lebih dari 1, yang mengindikasikan bahwa sektor perikanan merupakan sektor unggulan di wilayah ini. Temuan ini mengungkapkan bahwa sektor perikanan memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui ekspor dan pengembangan yang signifikan.
2.	Neng Wita Nursaadah Fitriah, Rahayu Kusumadewi, Ai Siti Farida (2022) dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran”. Penelitian ini menggunakan uji Alpha Cronbach’s untuk mengukur reliabilitas. Hasilnya, variabel Strategi Pengembangan Sektor Perikanan (X) memiliki nilai 0,519 yang cukup reliabel, sedangkan variabel Peningkatan PAD (Y) bernilai 393 yang agak reliabel. Uji normalitas penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200 ($>0,05$), data dinyatakan normal. Uji parsial mengungkapkan



	bahwa Strategi Pengembangan Sektor Perikanan (X) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Peningkatan PAD (Y) di Kabupaten Pangandaran.
3.	Zubaidah Rahman (2022) , dengan judul penelitian “Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Rasio Share dan Growth”. Penelitian ini menunjukkan bahwa selama 2016-2020, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki nilai share yang sangat rendah, menandakan ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat untuk membiayai belanjanya. Analisis growth juga menunjukkan nilai rendah, mencerminkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan masih perlu ditingkatkan
4.	Sitti Amalia, Suriani Bt. Tolo (2021) dalam penelitian yang berjudul “Faktor Penghambat Pengelolaan Retribusi Sektor Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna”. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kendala dalam pengelolaan retribusi sektor perikanan di Kabupaten Muna. Faktor penghambat tersebut meliputi peraturan daerah tentang tarif retribusi yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi terkini, kurangnya keteladanan pegawai dalam melakukan pungutan, minimnya sarana dan prasarana retribusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk membayar retribusi.
5	Wismoyo Adisaputra, Nuradyatun Pratama, dan Juanda Nawawi (2014) dengan judul penelitian “Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Majene sudah berjalan baik namun belum optimal. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan retribusi dalam lima tahun terakhir, kontribusinya terhadap PAD masih menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif.



G. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

